

KONTESTASI ELIT LOKAL DALAM KEBERAGAMAAN UMAT HINDU DI KABUPATEN KLATEN

Oleh:

Dhanu Pitoyo

dhanupitoyo@gmail.com

Universitas Palangkaraya

Proses Review 15 September-1 Oktober, Dinyatakan Lolos 5 Oktober 2019

Abstract

Klaten becomes a fertile ground for the development of various ideologies and opened opportunities for actors and institutions in the internal dynamics of Hindus in Klaten to bring up a phenomenon that is sociologically called contestation. This research focuses on the causes, forms and implications of local Hindu elite contestation in Klaten regency. Sociologically it can be understood that there is financial jealousy between actors and social organizations with Hindu religious pretensions; differences in interests between the local elites; the problem of self-actualization. Then the form of local elite contestation in the religiosity of the Hinduism in Klaten Regency enters and merges in various spheres and implementation of work programs of Hindu religious institutions. The implication of the contestation is the function and the role of Hindu organizations as the center of the orientation of the development and fostering of the ummah, weakening and moving away from their ideal goals and triggering the movement of Hindus into new contestations.

Keywords: *Contestation, Local Elites, Hinduism, Religious Organizations, Sociology*

Abstrak

Klaten menjadi lahan subur berkembangnya beragam ideologi dan membuka peluang bagi aktor maupun lembaga dalam dinamika internal umat Hindu di Klaten untuk memunculkan fenomena yang secara sosiologis disebut dengan kontestasi. Penelitian ini memfokuskan diri pada penyebab, bentuk dan implikasi kontestasi elite Hindu lokal di kabupaten Klaten. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa terjadi kecemburuan finansial antar aktor, maupun lembaga sosial yang berpretensi keagamaan Hindu; perbedaan kepentingan antar elite lokal; persoalan aktualisasi diri. Kemudian bentuk kontestasi elite lokal dalam keberagaman Hindu di Kabupaten Klaten masuk dan melebur dalam berbagai ranah dan pelaksanaan program kerja lembaga-lembaga keberagaman Hindu. Implikasi dari kontestasi itu adalah fungsi dan peran lembaga umat Hindu sebagai pusat orientasi pengembangan dan pembinaan umat semakin melemah dan menjauh dari tujuan idealnya dan memicu pergerakan umat Hindu ke dalam kontestasi-kontestasi baru.

Kata Kunci : Kontestasi, Elit lokal, Hindu, Organisasi Keberagaman, Sosiologi

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Klaten terdapat pemeluk agama Hindu terbesar diantara kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah pemeluk agama Hindu di Kabupaten Klaten tercatat 100.902 jiwa, sedangkan Kabupaten Boyolali 55.912 jiwa, Kabupaten Sukoharjo 1.981 jiwa, Kabupaten Karanganyar 60.969 jiwa, Kabupaten Wonogiri 339 jiwa, Kabupaten Sragen 23.257 jiwa, Kota Surakarta (Solo) 1.981 jiwa (data Bimas Hindu Jawa tengah 2012). Klaten memiliki jumlah pemeluk agama Hindu terbanyak diantara Kabupaten se Karisidenan Surakarta (Solo Raya). Sehingga, geliat keberagaman Hindu di Kabupaten Klaten lebih kentara ketimbang Kabupaten lain di Karisidenan Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan jumlah pemeluk agama Hindu yang tidak sedikit, bermunculan berbagai lembaga keagamaan Hindu. Tiap-tiap lembaga memiliki tupoksi dan pembagian kerja yang telah diatur dalam AD/ART kelmbagaan masing-masing namun memiliki sasaran sama, yaitu Umat Hindu di Kabupaten Klaten pada khususnya dan umat Hindu Indonesia pada umumnya. Lembaga keagamaan Hindu yang berada di kabupaten Klaten di antaranya: 1) Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kab. Klaten /PHDI; 2) Sekolah Tinggi Hindu Dharma/STHD; 3) Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Hindu /GARABIMAS; dan 4) Rumah Sakit Cakra Husada/RS. Cakra). Lembaga tersebut tidaklah luput dengan nuansa kontestasi wacana oleh elite-elitenya. Tiap-tiap lembaga Hindu ini nampak bersaing merebut perhatian dan pengakuan atas kinerja yang dilakukan pada umat Hindu di Kabupaten Klaten. Kemunculan beberapa lembaga keagamaan Hindu di Kabupaten klaten akan mempermudah pemeluk agama Hindu dalam berbagai pelayanan sosial dan birokrasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antar lembaga karena semakin banyak lembaga, maka semakin besar pula peluang terjadinya gesekan antar pengendali lembaga. Hal ini terjadi karena upaya menunjukkan atau pengaktualisasian diri oleh pengendali lembaga.

Kontestasi yang terjadi yang di kalangan elite lokal Klaten pada akhirnya mengarah pada situasi , kondisi konflik yang merambah ke

wilayah internal maupun eksternal. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, tetapi dalam praktiknya tidak pernah bias dihindari. Dari sudut pandang agamawan, khususnya agama Hindu, kontestasi yang mengarah ke persaingan terbuka yang memicu munculnya ketegangan dan konflik akan dipandang sebagai kekalahan Hindu, siapa pun individu atau golongan yang memenangkan kontestasi tersebut. Yang kalah dan yang dirugikan tetap saja Hindu. Kontestasi yang terjadi dalam keberagaman umat Hindu di Kabupaten Klaten menjadi fokus kajian yang menitik beratkan pada persoalan sosiologis terutama penyebab, bentuk, dan implikasi kontestasi elite local.

II. METODE PENELITIAN

Dari kacamata agamawan khususnya agama Hindu, Kontestasi yang mengarah ke persaingan terbuka memicu munculnya ketegangan dan konflik akan dipandang sebagai kekalahan Hindu, siapapun individu atau golongan yang memenangkan kontestasi tersebut. Yang kalah dan yang dirugikan tetap saja Hindu (Rsi Bhisma dalam Bhisma Parwa).

Indikasi lain penyebab munculnya kontestasi elite lokal keagamaan umat Hindu di Klaten adalah ketatnya persaingan memperebutkan modal yang nantinya akan dimaikan dalam kancah keberagaman umat Hindu di Kabupaten Klaten. Modal yang diperebutkan oleh elite lokal dalam keberagaman umat Hindu di Kabupaten Klaten dalam modal Kultural, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik.

III. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

1. Sakralisasi Agama Dan Politik

Peneliti menemukan data bahwa perebutan modal dilakukan oleh elite memiliki tujuan lain selain pelayanan dan pembinaan umat. Salah satu data yang terbangun adalah upaya pengaktualisasian diri elite melalui arena politik praktis. Politik dan agama memiliki kesamaan, yaitu dianggap sakral. Artinya , keduanya memiliki motif yang dianggap memiliki nilai. Keduanya memiliki dimensi paralel sehingga orang tidak mungkin melepaskan aspek agama dalam politik agama

dengan misi suci memberikan legitimasi dan justifikasi atas apa yang dibawanya. Sementara itu, realitas sosial politik merupakan internalisasi dan aktualisasi sosiologis masyarakat. Hubungan politik dan agama dapat saling “menguatkan” di antaranya namun tidak tertutup kemungkinan mereka saling “membunuh”.

Analisa di atas menunjukkan tipe terjadinya kontestasi elite lokal. Persaingan terbuka tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu (1) penyebab yang di bangun ; (2) motif; (3) sasaran; (4) kepentingan politik. Faktor pertama selalu digunakan sebagai ‘kambing hitam’ dalam membangun visi, misi percaturan kontestasi. Faktor kedua adalah ‘tarian’ atau jurus-jurus yang digunakan dalam gerakan. Faktor ketiga adalah *stakeholder* (umat Hindu) yang bisa diikuti sertakan dalam permainan untuk mendukung keberhasilan gerakan. Keempat adalah tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang menjadi target dimunculkannya suatu penyebab gerakan yang dilakukan.

Bentuk-bentuk kontestasi elit lokal dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten adalah, pertama, kepercayaan umat Hindu kepada Sang Hyang Widhi Wasa di Kabupaten Klaten tidak mudah diamati. Umumnya mereka memiliki *palinggih* atau *merajan* yang dimiliki oleh setiap keluarga Hindu seperti di Bali. Peneliti mendapat kesulitan dalam pengamatan aktivitas Keluarga Hindu di Kabupaten Klaten. Namun, aktivitas keagamaan secara luas (keagamaan umat/masyarakat Hindu) dapat teramati. Yaitu, mereka memfungsikan Pura setempat sebagai pusat religiusnya. Kedua, ritual agama menetapkan cara yang seharusnya bagi penataan hubungan manusia dengan tuhan. Bentuk peribadatan umat Hindu di Kabupaten Klaten merupakan implementasi dari pelaksanaan *acara* agama. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu, kata *acara* sering diberi awalan *upa*, yang bermakna sekitar, sehingga kata *upacara* bermakna sekitar tata cara pelaksanaan agama Hindu. Dengan demikian maka *acara* agama Hindu menyangkut persoalan sekitar tempat upacara (lokasi), saat upacara (durasi) , suasana upacara (situasi) , rangkaian upacara (prosesi), ucapan upacara

(resitasi) , alat upacara (sakramen), pemimpin upacara, dan bunyi-bunyian upacara (instrumen).

Ketiga, jaran *susila* dalam agama Hindu menurut Sura, dkk.(2002:11) mencakup aspek yang begitu luas dan beberapa di antaranya merupakan ajaran moral yang diajarkan secara universal oleh semua agama. Sejalan dengan ini, Bertens (2007:36) menegaskan, secara umum aturan moral dalam suatu agama dapat dikelompokkan menjadi dua macam: aturan moral yang dianut secara internal oleh penganutnya misalnya, tentang makanan yang haram, ibadat, dan puasa. Kemudian, aturan moral yang diterima oleh semua agama, seperti jangan mencuri, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzinah. Aturan moral kelompok pertama menekankan pada aturan moral yang unik dan khas berlaku bagi penganut agama tertentu, sedangkan kelompok kedua melampaui kepentingan suatu agama sehingga menjadi aturan yang berlaku umum dalam masyarakat. Malahan bidang ini banyak diambil oleh institusi hukum dalam hal penegakannya. Akan tetapi, aturan-aturan moral mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan nilai dan norma dalam masyarakat, bahkan ketika nilai ditentang dan norma dilanggar perkembangan baru, modernisasi, misalnya. Mengingat modernisasi dengan berbagai saluran memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya pergeseran nilai dan norma moral masyarakat. Bertens (2007 : 31) menegaskan situasi etis dalam dunia modern di tandai tiga ciri yang paling menonjol, yaitu (1) pluralism moral, (2) munculnya masalah-masalah etis tidak terduga, dan (3) semakin tingginya kepedulian etis yang bersifat universal.

Keempat, terbentuknya suatu organisasi bahkan lembaga dalam suatu agama adalah hal yang wajar. Demi kelangsungan dan kelestarian agama dan berkat kedudukannya yang mapan serta organisasi yang kuat dan rapi, suatu agama akan mudah melaju menuju tugasnya yang mulianya. Akan tetapi, keberadaan lembaga agama tidak menutup kemungkinan adanya kesulitan dan dilema. Kesulitan yang dihadapi dalam lembaga agama masih dimungkinkan untuk mendapatkan pemecahan atau jalan keluar sebagai solusi terbaik. Akan tetapi, ketika

dilema menghadangnya diperlukan pertimbangan mendalam sebelum memutuskan kebijakan akan diambil oleh lembaga tersebut. Pada saat agama masih dekat atau bahkan samadengan pusat pendiriannya, agama tersebut peneliti anggap belum mengalami kesulitan yang berarti. Agama Hindu formal di Bali belum mengalami tingkat kesulitan seperti agama Hindu formal di Jawa khususnya kabupaten Klaten. Lembaga agama Hindu formal di Bali masih mampu tersenyum menghadapi kesulitan. Diferensiasi lembaga keagamaan di Bali masih berkuat dalam kelembagaan Hindu. Artinya, jika terjadi ketidakcocokan umat dengan lembaga keagamaan, umat tersebut masih tetap Hindu sebagai agama yang diyakininya.

Akan tetapi jika agama itu memasuki zaman yang situasi kultural dan sosialnya berbeda dengan agama asalnya, maka agama tersebut akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pemecahannya. Proses sosial tidak dapat terhindarkan dalam kondisi seperti ini. Masuknya agama Hindu formal ke Kabupaten Klaten menjadi salah satu contoh peristiwa tersebut. Agama Hindu formal dihadapkan dengan kondisi berbeda dengan tempat asalnya (Bali). Dalam konteks ini, masyarakat klaten dituntut untuk melakukan persesuaian dengan aturan main agama formal yang mereka anut. Keberagaman umat Hindu di Klaten memiliki dinamika tersendiri. Mereka mengikuti lembaga yang telah ada (PHDI) dan juga membentuk lembaga keagamaan dan sosial untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan pengajaran, dan kedisiplinan dalam beragama.

Program kerja lembaga adalah wadah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Namun dalam perjalanannya, ada beberapa, ada beberapa program kerja yang dimiliki oleh kelembagaan umat Hindu di Kabupaten Klaten yang terselip motif tertentu demi mencapai kepentingan elite kelembagaan. Program kerja yang dimiliki oleh lembaga keagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten terkesan sebagai upaya 'menandingi' program kerja yang dimiliki oleh lembaga lainnya. Kondisi semacam ini oleh Nothingham (1985) dianggap sebagai sebuah kewajaran ketika pimpinan organisasi (lembaga) keagamaan berkembang pada waktu dan

bahkan tempat yang sama. Nothingham (1985:161) mengatakan, "program kerja sebuah lembaga adalah reinterpretasi pemimpinya dan tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan lembaga itu sendiri".

2. Delegitimasi Institusi

Institusi pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi yang terarah serta mengikat individu. Memiliki otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-sosial juga definisi institusi lainnya. Institusi religius (keagamaan) menginginkan tercapainya kebutuhan dasar yang berkenaan dengan dunia supra-empiris. Bagi manusia religius kepentingan dari kategori 'dunia lain', kepentingan akhirat, merupakan kepentingan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kepastian akan hal tersebut menjadi fokus utama (norma satu-satunya) dan segala-galanya (Hendropuspito, 1984:114).

Semua agama cenderung melestarikan eksistensinya dan kemanfaatannya bagi masyarakat dalam bentuk organisasi dan institusi. Pembentukan institusi diupayakan oleh agama lokal (primitif) yang masih perlu dipertanyakan siapa pendiri dan pengagasnya, terlebih lagi agama modern yang asal-usul serta berdirinya masih teracak. Ismail (2012) membedakan perbedaan institusi agama primitif (bahari) dengan agama modern. Menurutnya, organisasi agama bahari tercampur menjadi satu dengan masyarakat. Semua sektor kehidupan manusia adalah religius serta pemimpin masyarakat sekaligus menjadi pemimpin agama. Sedangkan organisasi agama modern telah mencoba membedakan yang sakral dan yang profan.

Bertalian dengan hal tersebut, Hendropuspito (1984) dan Scharf (1995) membagi unsur keagamaan yang mendapatkan benteng perumusan dan aturan hukum menjadi (3) tiga, yaitu : (1) unsur pelayanan dan pengajaran, (2) unsur pimpinan dan kekuasaan, (3) status jabatan dan peranan, dan (4) disiplin keagamaan.

3. Kemerostan Jumlah Pemeluk Umat Hindu

Jumlah pemeluk agama Hindu di Kabupaten Klaten menunjukkan angka yang semakin menurun pada setiap tahunnya. Pada tahun 2007, jumlah pemeluk agama Hindu terdata sebanyak 11.507, tahun 2008 sebanyak 9.608, dan tahun 2009 sebanyak 9.340 (Klaten dalam Angka, 2010). Angka kemerostan jumlah pemeluk agama Hindu tersebut rata-rata 1.000 dalam setiap tahunnya. Jika kemerostan tersebut disebabkan karena kematian dan pernikahan (masuk agama lain) maka agama Hindu rata-rata ditinggalkan 3 pemeluknya dalam setiap hari.

Data umat Hindu yang dimiliki oleh bimas Hindu Prov. Jawa Tengah pada Januari 2012 menunjukkan pemeluk agama Hindu di Kabupaten Klaten sebanyak 100.902 jiwa. Terdapat perbedaan yang signifikan ditunjukkan oleh data Klaten dalam angka dan data bimas Hindu Jawa Tengah. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan pencarian data (sensus) umat secara langsung, peneliti menemukan data bahwa jumlah pemeluk agama Hindu di Kabupaten Klaten terhitung 4047 jiwa.

4. Umat Hindu Apatis Terhadap Elite

Individu pemegang kekuasaan formal selalu berusaha menancapkan hegemoni. Kekhawatiran akan lepasnya kedudukan yang menopang posisi sosial dalam masyarakat menjadi konsentrasi utama. Dengan demikian tujuan utama memberdayakan umat Hindu menjadi prioritas sekunder. Krisis kepemimpinan ini merupakan akibat dari pergeseran nilai yang dibawa oleh gerakan globalisasi.

Pada tahun-tahun 1990an, dogma agar manusia sebagai makhluk individu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan masih memiliki gaung sebagai pendidikan berbabsis karakter. Hilangnya semboyan ini berbanding lurus dengan terjadi di jaman sekarang. Agaknya manusia semakin terarah menjadi makhluk binatang tegak yang terus memburu hak-hak asasi secara mutlak dengan sedikit atau bahkan mengesampingkan kaidah-kaidah sebagai makhluk sosial.

Hal vital yang sering terjadi tidak disadari

oleh pemimpin atau tokoh umat ketika 'memperkosakan' nilai-nilai yang disepakati secara kolektif, apalagi kolektif keagamaan menyebabkan cacat nilai yang berdampak pada penilaian umat. Penilaian negatif tentu saja akan menyebabkan ketimpangan dalam tubuh kolektif keumatan. Yang terjadi selanjutnya adalah munculnya sikap apatis dari umat dan pemimpin umat. Kondisi tersebut diibaratkan seperti ranting kering bagi kelompok lain. Kelompok lain kemudian masuk ke dalam kondisi *chaos* tersebut dengan membawa tawaran-tawaran lain yang lebih indah tanpa disadari oleh tubuh Hindu bahwa hal tersebut merupakan ancaman keumatan.

Tokoh umat, pemangku kebijakan, dan pemuka agama Hindu ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membendung program "tsunami penyeragaman kepercayaan" dari pihak luar. Seakan-akan para tokoh ini hanya diam terpaku melihat kehancuran tembok iman Hindu satu persatu. Yang nampak kemudian adalah 'agama Hindu' yang sebenarnya memiliki konsep dasar seperti sifat-sifat air menjadi kaku, membeku.

Seolah-olah agama Hindu menjadi agama yang tertutup dan terkucil. Rancang bangun politik yang menyebabkan terjadinya hal tersebut sesungguhnya tidak perlu terjadi di negara Indonesia yang memiliki dasar politik kenegaraan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun kenyataannya memang jaminan perlindungan dalam UU tersebut seakan-akan kalah oleh gerakan golongan misioner keagamaan lain.

Alternatif yang bisa peneliti tawarkan untuk membendung kondisi semacam ini adalah membangun kekuatan kelompok kecil, yang boleh saja disebut kelompok militan Hindu Nusantara. Individu yang tergabung dalam kelompok ini harus dibekali dengan bermacam-macam pengetahuan, pemahaman, dan keahlian khusus untuk menegakkan eksistensi Hindu di Indonesia dengan strategi-strategi yang betul-betul genius. Peneliti menyodorkan 'strategi kebudayaan' sebagai senjata yang perlu digunakan, menimbang bahwa pada era ini, dunia internasional telah melampaui perang informasi, dan sekarang dunia memasuki perang kebudayaan.

5. Muncul Pergerakan Umat

Pada pengumpulan data harapan umat Hindu di Kabupaten Klaten, peneliti sedikit mendapat kesulitan. Kesulitan ini dikarenakan umat Hindu di Kabupaten Klaten sudah terlanjur terkotak-kotak. Dan setiap kotak memiliki harapan yang berbeda sesuai kotak mana yang mereka dihidupi dan dibesarkan.

Umat Hindu di Kabupaten Klaten memiliki harapan birokrasi yang simple. Misalnya dalam pengurusan akta pernikahan ataupun yang berkenaan dengan administrasi sebagai Warga Negara dan Warga Agama. Dalam upaya keamanan dan kenyamanan beribadat umat Hindu juga memiliki harapan besar terhadap sertifikat pura yang sebelumnya atau selama ini diperoleh dari hibah lesan pemerintah desa. Umat Hindu mendapat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non formal sebagai pondasi pematangan mental dan spiritual generasi Hindu.

Diadakan kegiatan/usaha yang menunjang peningkatan kesejahteraan umat, menurut peneliti bukanlah harapan yang berlebih oleh umat Hindu di Kabupaten Klaten. Karena, faktor ekonomilah yang membuat angka kemerosotan jumlah pemeluk agama Hindu melonjak secara signifikan. Perlu diadakannya penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding agar tafsir tentang agama Hindu tidak semakin semrawut dan membuat umat Hindu semakin bingung. Harapan berikutnya adalah pendirian atau menyelenggarakan pusat-pusat penelitian sosial, dan mengusahakan keadilan, rekonsiliasi dan perdamaian, mengadakan perdampingan psikologis umat serta memperjuangkan hak asasi manusia serta martabat manusia.

Harapan lain yang dimiliki oleh umat Hindu di Kabupaten Klaten adalah pelayanan dan mendirikan rumah pembinaan dan kerokhanian, untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan ajaran Hindu, agar selalu diupayakan serta mendirikan dan/atau menyelenggarakan pusat spiritualis, pusat latihan rohani bagi umat Hindu. Namun, menurut peneliti, harapan sederhana yang tidak sederhana umat Hindu di Kabupaten Klaten adalah bersatunya elite lokal untuk membangun Hindu supaya lebih baik.

Melihat carut-marutnya keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten, sekelompok

pemuda Hindu yang dimotori oleh Widhi Prabowo, S.H; Widhi Widayat, S.Sos, M.Pd; Widhi Prasetyo. S.St; Suherman, S.Ag, M.Pd; Toto Margiyono, S.Pdh, M.Pd dan beberapa tokoh lainnya mengambil sikap untuk melakukan pergerakan. Pergerakan tersebut pada awalnya hanya perkumpulan diskusi yang menamakan 'Perduli Umat Hindu' di Jawa, khususnya kabupaten Klaten, namun akhirnya mengerucut sebagai pergerakan nyata yang berbadan hukum yaitu Yayasan Dharma Ghosa. Bentuk pergerakan pemuda peduli umat tersebut didukung oleh beberapa tokoh *Sepuh* (Tua) di antaranya, Sri Jangkung Djaka Sularsa, S.Ag, Drs. Tri purwanta, S.Ag, M.PdH dan beberapa tokoh lainnya.

Geliat dan semangat keberagamaan yang dimotori Yayasan Dharma Ghosa seakan menjadi semangat baru dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten. Namun, disadari atau tidak Yayasan Dharma Ghosa masuk menjadi kontestan baru dalam drama kontestasi Elite Lokal keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten. Peneliti menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran. Yayasan Dharma Ghosa adalah sebuah bentuk pergerakan dari umat yang selama ini merasa terabaikan atau boleh jadi yayasan ini adalah bentuk kekecewaan terhadap elite lokal dalam keberagamaan umat Hindu yang berada di Kabupaten Klaten.

6. Munculnya Kontestasi Baru

Seperti halnya kontestasi yang terjadi di agama lain, dalam intern Hindu muncul pula aliran-aliran yang mengklaim diri sebagai yang paling utama. Dogma yang diberikan kepada umat memang mampu menumbuhkan fanatisme. Dan fanatisme dalam beragama sangat perlu. Fanatisme yang peneliti maksud adalah fanatisme positif, yakni memegang teguh ajaran agama untuk menangkis dogma-dogma ajaran agama lain yang sering kali bisa menggoyang keteguhan iman seseorang.

Kontestasi antaraliran dalam mencari umat di Klaten terjadi antara kubu RM *versus* kubu RB *versus* RG. Ketiganya berlomba-lomba menjaring pengikut sebanyak-banyaknya. Perbedaan ideologi serta konsep yang bisa dilihat secara langsung diantara ketiganya adalah mengenai masalah-masalah sesaji atau banten, mantra-

mantra yang digunakan, cara melantunkan mantra, serta tata cara upacara keagamaan. Setelah melihat, mengamati, mencermati, dan menganalisa gaya masing-masing kubu, dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Hindu di Kabupaten Klaten terbagi atas tiga golongan, yakni golongan *sisya*, *priyayi*, dan *kawula* (rakyat-pen).

Fenomena serupa juga terdapat dalam intenal agama Islam yang pernah digarap oleh Geertz yang membagi kelompok Muslim di Jawa menjadi tiga golongan: *santri*, *priyayi*, dan *abangan* (lihat Geertz, 1973). Lalu dimanakah posisi pemangku kebijakan di lembaga formal nonformal? sebagai individu, para pemangku kebijakan tersebut juga terpecah mengikuti ketiga kelompok keagamaan tersebut.

IV. PENUTUP

Faktor pentingnya yang melatarbelakangi terjadinya kontestasi elite lokal dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten, yaitu: (1) Adanya kecemburuan finansial, baik tingkat kelembagaan formal dan kelompok partikelir maupun secara individual di tingkat para elite; (2) Adanya perbedaan kepentingan antar elite lokal dalam mempertahankan dan merebut modal/kapital yang dimiliki umat Hindu di Kabupaten Klaten; (3) Adanya keinginan para elite menunjukkan aktualisasi diri melalui lembaga yang dipimpinnya dengan caramenanamkan pengaruh, wibawa, dan kuasa mereka masing-masing. Bentuk kontestasi elite lokal dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten masuk dan melebur dalam berbagai ranah dan pelaksanaan program kerja lembaga-lembaga keberagamaan Hindu, diartikulasikan, baik terhadap hal-hal yang berkelidat langsung dengan aspek keagamaan, yakni dimensi *Tattwa*, *Etika*, dan *Upacara*, maupun yang tidak langsung dalam dimensi sosial kemanusiaan. Ketatnya kontestasi elite lokal dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten menyebabkan fungsi dan peran lembaga umat Hindu sebagai pusat orientasi pengembangan dan pembinaan umat

semakin melemah dan menjauh dari tujuan idealnya. Akibatnya, kepercayaan dan legitimasi umat Hindu terhadap para elite lokal untuk memperjuangkan kepentingan bersama umat Hindu menjadi semakin memudar. Kondisi ini kemudian, di samping menjadi faktor penting terhadap merosotnya jumlah umat Hindu di Kabupaten Klaten, juga menyebabkan umat Hindu terkotak-kotak, mengelompok dalam skala kecil, mengalami disorientasi, akhirnya memicu pergerakan umat Hindu ke dalam kontestasi-kontestasi baru.

Menurut Bourdieu, keberhasilan dalam memenangkan kontestasi adalah mampu menguasai dan memainkan modal kultural, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik. Namun kenyataannya, kontestasi elite lokal Hindu dalam keberagamaan di Kabupaten Klaten belum masuk pada tataran permainan modal seperti yang disampaikan Pierre Bourdieu (2010). SN, berhasil pada permainan modal kultural, sosial, simbolik, ekonomi, dan masih selalu berupaya dalam modal kultural dan modal politik. SY, bermain pada tataran modal simbolik dan ekonomi. Sedangkan IW, bermain pada modal ekonomi dan sosial. Kontestasi elite lokal merambah dalam sendi-sendi keberagamaan di Kabupaten Klaten menimbulkan nilai kesakralan dalam keagamaan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bernilai. Ketatnya kontestasi Elite Lokal Umat Hindu di Kabupaten Klaten menjadikan umat Hindu di Kabupaten Klaten terabaikan dan seolah-olah berjalan sendiri. Kondisi ini menambah arah kontestasi yang semula antar elite lokal bertambah menjadi kontestasi elite lokal dengan umat Hindu di Kabupaten Klaten. Akhirnya, kontestasi elite lokal dalam keberagamaan umat Hindu di Kabupaten Klaten memunculkan penolakan dari berbagai kalangan umat Hindu di Kabupaten Klaten. Salah satu bentuk penolakan tersebut adalah munculnya pergerakan kelompok umat Hindu yang bernaung di bawah yayasan *Dharma Ghosa* yang selanjutnya peneliti anggap sebagai salah satu kontestan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. 1972. 'The Idea of Power in Javanese Culture,' In Clarie Holt (ed), *Culture and Politics in Indonesia*. Florida: Cornel University Press.
- Anderson, Benedict. 2000. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta, Qalam
- Bogdan, H.R dan Biklen S.K. 1982. *Qualitative Research for Education, An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Bourdieu, Pierre. 1998. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra
- Bourdieu, Pierre dan Richard Jenkins. 1992. *Key Sociologists*. California: Standford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Faisal, Sanapiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fathroni, Abdurrahmat. 2006. *Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Geertz, Hildred. 1985. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Temprint
- Kuper, Ada dan Kuper Jessica. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurzweil, Edith. 2004. *Jaring Kuasa Strukturalisme*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Kleden, Ignas. 1987. *Masalah Kemiskinan Sosial-Budaya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Hadiz, Vedi. R dan Dhakidae, Daniel. 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Menara Gracia.
- Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan
- Kholiludin, Tedi. 2009. *Kuasa Negara Atas agama*. Jakarta: Media Group.
- Lacey, Hoda. 2003. *Mengelola Konflik di Tempat Kerja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Leege, David C. dan Kellstedt, Lyman A, 2006. *Agama dalam politik Amerika*. Jakarta: Kedubes Amerika dan Obor.
- Muzairi. 2002. *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moertono, Soemarsaid, 1985. *Negara Dan Usaha Bina Negara Di Jawa Masa Lampau*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Niel, Robert Van. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Bogor, Pustaka Jaya
- Nurhasim, Moch. 2005. *Konflik antar Elite Politik Lokal*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nottingham, Elizabeth K. 2002. *Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Nottingham, Elizabeth K. 1985, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Rajawali.
- Padmo, Sugijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Qodir, Zuly. 2001. *Agama Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali.
- Robertson, Ronald (Ed.). 1986. *Sosiologi Agama*, Jakarta, Aksara Persada Offset
- Robertson, Ronald. 1998. *Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Simon, Roger, 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Sirait, Arifudin, 2012. *Agama adalah Nelayan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Stange, Paul, 2009. *Kejawen Modern, Hakekat dalam penghayatan sumarah*, Yogyakarta: LKIS
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 2011. *Stategi Hindu*. Jakarta: Pustaka Jurnal Keluarga
- Veeger, K.J, 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Weber, Max. 2002. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yusron. 2009. *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri di tengah Demokrasi*. Jakarta. LP3ES